

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum hasil evaluasi pengelolaan keuangan desa di Desa Ayuhulalo sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Pendapatan Desa Ayuhulalo belum mencatat dan mengakui adanya pendapatan desa
3. Pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi anggaran tidak informasikan kepada masyarakat

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo hendaknya mempertahankan standar pengelolaan keuangan Desa dalam tahapan pelaksanaan APBDesa yang telah berlaku dan lebih memaksimalkan lagi karena terbukti pelaksanaannya berjalan dengan baik.
2. Pemerintah Desa Ayuhulalo diharapkan dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan desa dan selanjutnya harus dicatat dan diakui sebagai pendapatan desa.
3. Pelaporan realisasi anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik Dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press
- Agutino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Adjie, Zulfikar. 2015. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo
- Gibson, Ivanovich, Donnely. 1989. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Haris, Syamsudin. 2007. *Desentralisasi & Otonomi Daearah*. Jakarta: LIPI Press
- Islamy, M. Irfan, DR,MPA. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juliarta, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada.
- Mar'at. 1982 *Sikap Manusia Perubahan dan Pengukuran*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Perundang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Bupati Boalemo. Nomor 27 Tahun 2015. *Tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Boalemo*. Boalemo
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisas*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: PT. Indeks
- Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Sugiono. 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*.bandung: alfabeta
- Soetomo. 2012. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, AG, Drs,M.Si, MA. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung

- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.
- Wisakti, Daru. 2008. Implemetasi Alokasi Dana Desa. *Tesis*. Magister ilmu Administrasi Publik Universitas Diponegoro.
- Yustika, Ahmad. 2015. *Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa*, Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesi.